

KOMUNIKASI DAN ADVOKASI DALAM KOMITMEN PEMBANGUNAN PERKOTAAN BERKELANJUTAN MELALUI *MULTI-STAKEHOLDER PARTNERSHIP* DI PROVINSI LAMPUNG

Fritz Akhmad Nuzir^{1*}, Aulia Rahmawati², Kustiani³, Aditya Mahatidanar Hidayat⁴,
Okta Ainita⁵

^{1,3} Arsitektur, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, Indonesia

² Administrasi Publik, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, Indonesia

⁴ Teknik Sipil, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, Indonesia

⁵ Hukum, Universitas Bandar Lampung, Jl. ZA. Pagar Alam No.26 Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, Indonesia

*Corresponding e-mail : fritz@ubl.ac.id

DOI : 10.35472/jppk.v5i3.2231

ABSTRACT

Sustainable urban development can support the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly Goal 11, and can be optimized through multi-stakeholder collaboration. This paper aims to (1) Raise awareness among various parties about the importance of collaboration for sustainable cities and communities; (2) Advocate for active support from pentahelix stakeholders (government, private sector, academia, community, and media) through the principles of Multi-Stakeholder Partnerships (MSP); and (3) Strengthen institutional commitment to collaborative governance in achieving SDG 11 in Lampung Province. The research employs a descriptive qualitative method to examine the dynamics of communication and advocacy in cross-sectoral collaborative processes. Data collection was conducted through a series of audience meetings with various stakeholders, including government institutions, academia, civil society organizations, local communities, and the media. The findings conclude that the success of building sustainable cities and communities largely depends on strategic communication and systematic, participatory advocacy processes. The multi-stakeholder partnership (MSP) approach involving the pentahelix elements—government, academia, community, media, and the private sector—has proven to provide an inclusive and practical framework for collaboration. However, realizing sustainable urban development in Lampung Province still faces significant challenges, particularly regarding slum settlement issues that require special attention.

Keywords: Multi-Stakeholder Partnership, SDGs, Urban, Pentahelix, Sustainable Development

A. PENDAHULUAN

Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Provinsi Lampung pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 9,5 juta jiwa dengan data dasar jumlah penduduk tahun 2024 jumlah penduduk Provinsi Lampung sebesar 9,4 juta dan laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,12% (BPS Provinsi Lampung, 2024a). Bertambahnya jumlah penduduk khususnya di wilayah perkotaan berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan kota dengan meningkatnya mobilitas dan mempengaruhi ketersediaan lahan (Tamin, 1997). Selain itu, peningkatan penduduk juga berpengaruh terhadap peningkatan kawasan kumuh di perkotaan (Putri, 2021).

Pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan merupakan bagian integral dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan ke-11 (SDGs 11). Provinsi Lampung telah menunjukkan kemajuan penting dalam mencapai SDGs 11 melalui

berbagai program pembangunan yang menargetkan peningkatan kualitas permukiman, pengurangan kawasan kumuh, serta peningkatan akses terhadap fasilitas perkotaan yang layak. Hal tersebut terlihat dari menurunnya persentase rumah tangga yang tinggal di hunian kumuh setiap tahunnya dari 2021 sampai 2023 yaitu 6,98% di tahun 2021; 6,80% di tahun 2022 dan 5,75% di tahun 2023 (BPS Provinsi Lampung, 2024b). Selain itu berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023 terkait akses terhadap fasilitas perkotaan yang layak, 84,58% rumah tangga di Provinsi Lampung sudah memiliki akses terhadap sanitasi layak (BPS Provinsi Lampung, 2023). Selain itu, berdasarkan data dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK) Provinsi Lampung (2023), kawasan kumuh di Provinsi Lampung juga telah mengalami penurunan luas dari 350 hektar pada tahun 2020 menjadi 297,25 hektar pada tahun 2023.

Namun, dari seluruh pencapaian tersebut masih terdapat tantangan signifikan terkait isu permukiman kumuh yang perlu mendapat perhatian, khususnya dalam hal kolaborasi dari seluruh *stakeholder* yang terlibat. Dalam konteks pembangunan perkotaan berkelanjutan kolaborasi lintas aktor menjadi salah satu upaya dalam membangun konsistensi komitmen serta mencegah munculnya kembali kawasan kumuh. Oleh karena itu kolaborasi *stakeholder* di Provinsi Lampung dapat menjadi kunci untuk memastikan bahwa capaian yang ada tidak hanya bersifat sementara, tetapi terintegrasi dalam agenda pembangunan jangka panjang.

Kolaborasi multipihak dengan pendekatan pentahelix menjadi kunci dalam mencapai SDGs 11. Salah satu contoh nyata kolaborasi ini adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang melibatkan pemerintah, komunitas lokal, swasta, dan akademisi. Program ini berhasil menurunkan luasan kumuh secara signifikan melalui berbagai intervensi fisik dan sosial (Kementerian PUPR, 2021). Di Kota Bandar Lampung yang menjadi ibukota Provinsi Lampung contohnya, implementasi Program KOTAKU masih mengalami kendala di antaranya terkait koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat yang kurang memahami pelaksanaan program (Putri, 2021). Hal ini juga sejalan dengan penelitian Pratana (2023) yang menemukan hambatan dalam Program KOTAKU di Kota Bandar Lampung yaitu kurangnya kesadaran masyarakat serta masih banyaknya permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan perlu adanya peran serta berbagai pihak termasuk masyarakat untuk menangani permasalahan kawasan kumuh khususnya di Provinsi Lampung yang lebih luas.

Dengan pendekatan kolaborasi multi-pihak, Pemerintah Provinsi Lampung juga saat ini tengah membangun komunikasi dan advokasi yang difasilitasi oleh *Center for Sustainable Development Goals Studies* Universitas Bandar Lampung (SDGs Center UBL), dengan dukungan dari *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH dalam sebuah program yang diberi nama “Kemitraan Multi Pihak untuk Inovasi SDGs 11 di Provinsi Lampung (KEM11LAU Project)”. Program ini merupakan bagian dari implementasi program utama GIZ yaitu *Strengthening Capacities for Policy Planning for the Implementation of the 2030 Agenda in Indonesia and in the Global South*

Phase II (SDGs SSTC Phase II) yang bertujuan untuk mendukung pencapaian dua *outcome* utama yaitu:

1. terbangunnya kolaborasi berbagai pemangku kepentingan urban untuk membangun kota dan komunitas berkelanjutan dengan akses yang lebih baik ke perumahan di kawasan perkotaan dan layanan dasar; dan
2. terbina dan terdampingnya kelompok masyarakat perkotaan yang produktif dan inklusif untuk meningkatkan kualitas lingkungan perumahan yang berkelanjutan di kawasan perkotaan.

Pendekatan kolaborasi multi-pihak dapat menciptakan dampak yang berkelanjutan khususnya dalam pencapaian SDGs. Menurut Kuenkel *et al.* (2021), kolaborasi multi-pihak merupakan suatu pendekatan sistematis yang melibatkan berbagai aktor dari sektor publik, swasta, akademisi, komunitas, dan media untuk menciptakan perubahan transformatif dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pendekatan ini mengedepankan dialog yang konstruktif, kepemimpinan kolaboratif, dan proses berorientasi hasil yang memungkinkan semua pemangku kepentingan terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi kebijakan pembangunan. Pemecahan permasalahan yang kompleks seperti pembangunan berkelanjutan dibutuhkan pendekatan lintas sektor yang berhubungan seperti aktor terkait, karena tidak ada satu *stakeholder* yang dapat menangani masalah yang kompleks sendiri (Jansen & Kalas, 2020).

Dalam konteks Indonesia, kolaborasi multi-pihak telah banyak diterapkan dengan mengadopsi pendekatan pentahelix sebagai strategi pembangunan kolaboratif, termasuk dalam perencanaan kota dan pengelolaan permukiman (Pradhipta *et al.*, 2021). Pendekatan ini menegaskan pentingnya integrasi lintas lima sektor yaitu akademisi, pengusaha, komunitas, pemerintah, dan media (*Academic, Business, Community, Government, Media/ ABCGM*) guna mengatasi kompleksitas masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan (Kelvin *et al.*, 2022). Emerson *et al.* (2012) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai proses dan struktur yang melibatkan pelibatan lintas sektor dalam pengambilan keputusan bersama yang bersifat konsensus, berdasarkan pada saling percaya, komitmen bersama, dan orientasi hasil. Ini sejalan dengan prinsip *Multi-Stakeholder Partnership* (MSP) di mana aktor pemerintah bekerjasama dengan aktor non-pemerintah untuk menciptakan keadaan yang saling menguntungkan di mana masing-masing aktor menyatukan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan bersama (Beisheim & Simon, 2020). Kemitraan yang kuat dapat mendorong peningkatan partisipasi, inklusi, dan keragaman serta melibatkan kerja sama dan koordinasi antar pihak (Maltais *et al.*, 2018). Oleh karena itu permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana komunikasi strategis dan advokasi yang intensif mampu meningkatkan dukungan dan komitmen dari berbagai pihak dalam mewujudkan kota dan komunitas yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Pembahasan pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui MSP digunakan empat pilar dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam buku *Leading Transformative Change Collectively* (Kuenkel *et al.*, 2021), yaitu: (1) *Shared Purpose* yang mengacu pada kesamaan visi atau tujuan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu kolaborasi; (2) *Engaged Collaboration* yang merujuk pada tingkat partisipasi aktif semua

pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi; (3) *Joint Learning* yang menunjukkan bahwa semua pihak dalam kolaborasi tidak hanya berkontribusi dengan pengetahuan masing-masing, tetapi juga saling belajar, menyesuaikan perspektif, dan membangun pemahaman baru secara bersama; dan (4) *Collective Leadership* yang bentuk kepemimpinan dengan tidak terpusat pada satu individu tetapi tersebar di antara aktor-aktor yang terlibat. Keempat pilar tersebut merupakan *content analysis* dalam pembangunan perkotaan berkelanjutan melalui MSP yang menilai bagaimana membangun kemitraan transformatif.

Penelitian tentang kota berkelanjutan dan kawasan kumuh, termasuk kajian Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Indonesia telah banyak dilakukan. Seperti yang dilakukan di Kota Bandar Lampung oleh Putri (2021) dan Pratana (2023). Penelitian telah menunjukkan berbagai kendala dalam Hanya saja, telah mengidentifikasi adanya hambatan dalam implementasi program seperti kesadaran Masyarakat yang rendah, koordinasi multi pihak yang kurang optimal dan luasnya Kawasan kumuh. Disisi lain Kuenkel *et al.* (2021) dan Beisheim & Simon (2020) menekankan pentingnya kolaborasi multi pihak sebagai pendekatan dalam mencapai SDGs 11. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya mengkaitkan perspektif pembangunan kota berkelanjutan dan kolaborasi multi-pihak dengan fokus pada dimensi komunikasi dan advokasi yang memfasilitasi pembentukan visi bersama untuk mendorong keterlibatan aktif semua unsur pentahelix dalam mewujudkan SDGs 11. Kebaharuan dalam penelitian ini yaitu adanya irisan antara studi Pembangunan berkelanjutan, kolaborasi multi-pihak serta komunikasi dan advokasi khususnya dalam konteks lokus Provinsi Lampung.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji dinamika komunikasi dan advokasi dalam proses kolaboratif lintas sektor. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan audiensi dan wawancara terhadap sejumlah pemangku kepentingan, yang meliputi lembaga pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, komunitas, dan media. Kegiatan audiensi dilakukan di kantor atau lembaga setiap unsur para pemangku kepentingan, pada rentang Februari hingga Maret 2025 dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Presentasi informasi terkait KEM11LAU Project kepada masing-masing kelompok pemangku kepentingan. Dalam kegiatan ini ditujukan untuk memperkenalkan terkait KEM11LAU Project dan tujuan dari kegiatan audiensi yaitu Pemahaman bersama dan dukungan dari pemangku kepentingan, Kolaborasi program dan kegiatan serta Koordinasi dalam aksi implementasi dalam rangka mewujudkan Kemitraan Multi Pihak untuk Inovasi SDGs 11 di Provinsi Lampung.
- b. Diskusi yang dilaksanakan untuk menggali ide, masukan, serta solusi kolaboratif dari para pemangku kepentingan sebagai upaya mencapai SDGs 11 di Provinsi Lampung.
- c. Dokumentasi hasil temuan diskusi secara tematik untuk mendukung analisis kolaboratif antar pemangku kepentingan.

Setiap audiensi didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk *Minutes of Meeting* (MoM), yang memuat paparan, pertanyaan, tanggapan, dan usulan dari masing-masing pihak. Proses audiensi dilakukan secara terstruktur dengan format diskusi terbuka, dipandu oleh peneliti sebagai fasilitator. Peserta audiensi memberikan masukan dan pandangan mereka terhadap proyek KEM11LAU dan potensi kolaborasi yang dapat dikembangkan.

Data yang dikumpulkan dari seluruh dokumen MoM kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih (Budd dalam Kriyantono, 2010). Dengan teknik ini, dilakukan kategorisasi isi pembahasan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti: kolaborasi multipihak, advokasi kebijakan, komunikasi strategis, keterlibatan komunitas, peran media, dan keberlanjutan program. Setiap tema dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola komunikasi, bentuk dukungan, serta tantangan dan peluang dalam pelaksanaan pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan.

Narasumber dalam penelitian ini yaitu unsur pentahelix yang berkaitan dengan tugas dan isu yang terkait kota dan pemukiman, yaitu: 1) Unsur Akademisi, yaitu: Ir. Anshori Djausal dan ITERA; 2) Unsur Pemerintah, yaitu: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (PKPCK), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Badan Pusat Statistik (BPS); 3) Unsur Komunitas, yaitu: Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), *Youth Sanitation Concern* (YSC), Yayasan Agri Sustineri Indonesia (YASI), Sekolah Az-Zahra; 4) Unsur Media, yaitu: Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandar Lampung dan Radio Republik Indonesia (RRI); dan 5) Unsur Swasta, yaitu: Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Pendekatan *content analysis* memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam makna dan kecenderungan narasi yang muncul dari hasil audiensi, serta menjelaskan dinamika kolaborasi yang terjadi dalam konteks lokal. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menyusun kesimpulan dan rekomendasi yang kontekstual dan berbasis bukti. Sebagai bagian dari analisis data, dilakukan pula metode pemetaan peran pemangku kepentingan dengan mengacu pada pendekatan pentahelix dalam kerangka kemitraan multi pihak. Pemetaan ini mengklasifikasikan aktor-aktor kunci ke dalam lima kategori utama (pemerintah, akademisi, komunitas, swasta, dan media), dan mengidentifikasi kontribusi strategis mereka berdasarkan hasil diskusi audiensi. Pemetaan ini bertujuan untuk menyusun strategi kolaborasi yang sinergis dan kontekstual guna mendukung pencapaian SDGs 11 khususnya pada isu permukiman kumuh dan layanan dasar. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana interpretasi hasil dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan melalui triangulasi teknik dan sumber untuk memastikan validitas data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Audiensi dengan Unsur Pentahelix

Pembangunan berkelanjutan yang tercantum dalam Laporan Brundtland tahun 1987 yang dikembangkan oleh komisi dunia dalam hal lingkungan dan pembangunan bertujuan untuk mengembangkan solusi jangka panjang (Bulmer & Yanez, 2023). Tujuan pembangunan berkelanjutan mendorong kolaborasi antara semua sektor masyarakat dengan menggunakan pendekatan *bottom up*, di mana terdapat tiga kategori utama pemangku kepentingan (yaitu bisnis, pemerintah, dan masyarakat sipil) yang harus bekerja sama untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang (Stibbe & Prescott, 2020).

Dalam rangka membangun Kota dan Komunitas Berkelanjutan untuk merealisasikan tujuan SDGs 11 yaitu Kota dan Pemukiman yang berkelanjutan, melalui MSP telah dilakukan audiensi kepada pihak terkait yang dikategorikan dalam unsur Pentahelix. Model pentahelix dikenal dengan konsep ABCGM yaitu Akademisi, *Business Sector*, *Community*, *Government*, dan Media (Kelvin, 2022). Dalam penelitian ini telah dilakukan audiensi dengan lima unsur pentahelix di Provinsi Lampung yang berkaitan dengan urusan perkotaan dan permukiman. Lima unsur pentahelix tersebut berkembang menjadi dua belas pihak mitra strategis. Dari serangkaian audiensi yang dilakukan, ditemukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Akademisi

Menyoroti pentingnya komunikasi yang empatik dan kontekstual dalam mendorong keterlibatan masyarakat, serta perlunya memahami realitas lokal termasuk aspek sosial budaya dan psikososial masyarakat dalam program pembangunan berkelanjutan. Selain itu ditegaskan juga pentingnya kolaborasi antar perguruan tinggi dalam pengabdian masyarakat yang berfokus pada SDGs, khususnya melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis SDGs.

2. Pemerintah

Dinas PKPCK Provinsi Lampung menekankan urgensi menangani isu banjir perkotaan melalui program permukiman berkelanjutan serta pentingnya kolaborasi dalam pengelolaan fasilitas umum dan penyusunan regulasi pembangunan berkelanjutan. BPBD Provinsi Lampung menekankan pentingnya integrasi antara program edukasi kebencanaan dan peningkatan kapasitas masyarakat ke dalam kerangka yang jelas sesuai dengan dokumen perencanaan daerah, agar kegiatan dapat terlembagakan secara sistematis. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menunjukkan kesiapan mendukung penyediaan data dan kolaborasi untuk peningkatan kapasitas statistik masyarakat desa dalam kerangka SDGs.

3. Komunitas

Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS) menyoroti kritik terhadap pembangunan infrastruktur yang kurang mempertimbangkan dampak lingkungan jangka panjang, serta menekankan pentingnya edukasi publik terkait isu lingkungan seperti perubahan iklim dan banjir. Youth Sanitation Concern (YSC) mendukung kuat kolaborasi dengan pendekatan *participatory design* untuk pembangunan yang inklusif dan relevan secara lokal. Yayasan Agri Sustineri Indonesia (YASI) menawarkan kolaborasi strategis dalam pengelolaan

sumber daya alam berkelanjutan, ketahanan pangan, dan pelestarian ekosistem dan juga menekankan pentingnya kemitraan berbasis komunitas yang inklusif. Sekolah Az-Zahra telah menerapkan berbagai poin SDGs seperti pengelolaan sampah dan edukasi perubahan iklim, serta berencana mengembangkan "*Pocket Forest*" sebagai bentuk aksi nyata lingkungan.

4. Media

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) membuka peluang kolaborasi dalam peningkatan kapasitas jurnalis mengenai isu pembangunan berkelanjutan, meski tetap menjaga independensi media. RRI Bandar Lampung menyatakan dukungan penuh dalam penyebaran informasi edukasi melalui berbagai program siaran, khususnya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu penting seperti penanggulangan bencana, stunting, pengelolaan sampah, sanitasi, dan permukiman kumuh.

5. Swasta

Forum CSR Lampung mengemukakan perlunya integrasi antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial perusahaan dalam pencapaian SDGs, serta pentingnya sinergi lintas sektor untuk mencapai hasil yang nyata.

Dari penjabaran hasil penelitian di atas dapat disimpulkan poin-poin penting untuk mencapai tujuan SDGs 11 yaitu Kota dan Permukiman yang berkelanjutan di Provinsi Lampung yaitu: (1) Pentingnya komunikasi kontekstual dan partisipatif dari semua pihak; (2) Dukungan terhadap sinergi CSR dan pemerintah daerah untuk mendukung program; (3) Peran edukatif media dan literasi publik juga dibutuhkan untuk mengedukasi dan sosialisasi kepada masyarakat; (4) Partisipasi generasi muda dan sekolah serta pendekatan berbasis komunitas juga diperlukan khususnya dalam mitigasi bencana dan penanganan kemiskinan kawasan permukiman; (5) Sinergi riset dan pengabdian oleh perguruan tinggi didukung oleh ketersediaan data dalam pengembangan indikator; dan (6) Kontribusi NGO dalam pelestarian lingkungan juga sangat mendukung pencapaian tujuan SDGs 11. Namun kolaborasi multi-pihak dalam unsur pentahelix menghadapi beberapa tantangan diantaranya: perbedaan tujuan dari masing-masing unsur, kapasitas yang belum seimbang dan kendala koordinasi. Hal tersebut pun sejalan dengan hasil kajian Putri (2021) dan Pratana (2023).

2. Membangun Perkotaan Berkelanjutan melalui MSP

Pembahasan menggunakan pendekatan *content analysis* dengan mengacu pada prinsip-prinsip dalam buku *Leading Transformative Change Collectively* (Kuenkel et al., 2021), terutama mengenai bagaimana membangun kemitraan transformasional. Empat pilar utama dalam pendekatan ini yang relevan dengan hasil audiensi adalah:

1. *Shared Purpose* mengacu pada adanya kesamaan visi atau tujuan yang disepakati oleh semua pihak yang terlibat dalam suatu kolaborasi. Ini menjadi fondasi penting untuk menyatukan perbedaan perspektif dan mendorong tindakan kolektif (Kuenkel, 2016). Dalam penelitian ini seluruh pemangku kepentingan menunjukkan semangat yang sama dalam membangun kota dan komunitas berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam keterbukaan mereka untuk terlibat dan berbagi sumber daya dalam mendukung pencapaian Pembangunan perkotaan berkelanjutan.

2. *Engaged Collaboration* merujuk pada tingkat partisipasi aktif semua pemangku kepentingan dalam proses kolaborasi (Kuenkel, 2016). Dalam penelitian ini terjadi pertukaran gagasan yang aktif dan konstruktif, baik antara institusi pemerintah seperti Dinas PKPCK dan BPBD Provinsi Lampung, maupun organisasi sipil seperti YKWS dan YASI. Keterlibatan media dan sekolah juga memperkaya keragaman aktor.
3. *Joint Learning* menunjukkan bahwa semua pihak dalam kolaborasi tidak hanya berkontribusi dengan pengetahuan masing-masing, tetapi juga saling belajar, menyesuaikan perspektif, dan membangun pemahaman baru secara bersama (Kuenkel & Waddell, 2019). Melalui proses diskusi dan audiensi, para pihak menunjukkan kesiapan untuk belajar bersama, baik mengenai isu teknis seperti sanitasi dan perumahan, maupun aspek strategis seperti pendekatan partisipatif dan desain responsif.
4. *Collective Leadership* adalah bentuk kepemimpinan yang tidak terpusat pada satu individu tetapi tersebar di antara aktor-aktor yang terlibat, di mana tanggung jawab kepemimpinan dibagi sesuai konteks, kebutuhan, dan kapasitas masing-masing (Kuenkel, 2016). Terdapat inisiatif untuk membentuk struktur kolaboratif seperti forum bersama, serta rencana untuk integrasi kebijakan dari level lokal hingga provinsi, menunjukkan kesiapan untuk berbagi kepemimpinan.

Dengan demikian, pembelajaran utama dari diskusi ini menunjukkan bahwa keberhasilan advokasi SDGs sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh interaksi antar aktor dimaknai sebagai proses perubahan yang transformatif dan kolektif. Pendekatan pentahelix yang dilakukan tidak hanya bersifat simbolis, tetapi secara substantif menjadi medium kolaborasi yang bermakna untuk pengambilan keputusan berbasis inklusivitas dan keberlanjutan. Hal tersebut sejalan dengan prinsip MSP yang dikemukakan oleh Beisheim & Simon (2020) di mana MSP dapat menyatukan aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama.

3. Pemetaan Peran Para Pihak

Hasil audiensi menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam upaya penanganan kawasan kumuh secara berkelanjutan. Sebagaimana dikemukakan oleh Emerson *et al.* (2021) yang menekankan pada struktur dan proses bersama sehingga komunikasi dan advokasi menjadi instrumen penting untuk membangun legitimasi dan memperkuat dukungan kolaborasi. Dengan menggunakan pendekatan pentahelix berbasis MSP, masing-masing aktor memiliki peran strategis yang saling melengkapi. Pemerintah daerah, melalui Dinas PKPCK dan BPBD Provinsi Lampung, memainkan peran kunci dalam kebijakan, regulasi teknis, serta pengelolaan risiko bencana di kawasan rawan. BPS Provinsi Lampung, sebagai bagian dari pemerintah, menyediakan data yang sangat dibutuhkan untuk penentuan intervensi yang tepat sasaran dan berbasis bukti. Kalangan akademisi menawarkan kapasitas riset, pengembangan pendekatan desain partisipatif, dan penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan KKN tematik. Mereka juga berperan sebagai jembatan ilmu pengetahuan ke dalam kebijakan publik. Komunitas dan organisasi masyarakat sipil (CSO), termasuk YKWS, YSC, dan YASI, berperan besar dalam menjaga keberlanjutan sosial proyek. Sekolah Az-Zahra, meski berbasis pendidikan, aktif

mengembangkan aksi lingkungan di tingkat akar rumput dan memberikan contoh bagaimana pendidikan dapat memperkuat kesadaran sejak dini terhadap isu-isu SDGs.

Selanjutnya unsur media seperti RRI dan AJI membuka ruang penting bagi penyebaran informasi yang jujur, inklusif, dan edukatif. Mereka menjadi kanal strategis dalam membangun kesadaran dan dukungan publik terhadap isu kawasan kumuh. Dari sisi swasta, Forum CSR Lampung menunjukkan potensi kontribusi melalui pembiayaan, teknologi, dan jaringan kolaborasi. Mereka dapat menjadi katalis dalam program-program revitalisasi dan tanggung jawab sosial yang mendukung tujuan SDGs 11.

Dengan memetakan peran ini secara jelas, akan lebih mudah merancang mekanisme koordinasi, indikator kolaboratif, dan forum kolaborasi berkelanjutan yang memungkinkan pencapaian target SDGs 11 secara lebih efektif dan terarah di Provinsi Lampung. Secara lebih jelas pemetaan peran dari masing-masing unsur pentahelix ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Peran Multipihak

Kelompok Pentahelix	Institusi/ Organisasi	Peran Strategis dalam SDGs 11 (Permukiman Kumuh)
Pemerintah	Dinas PKPCK Provinsi Lampung,	- Menyediakan kebijakan, regulasi, dan program penataan kawasan kumuh
	BPBD Provinsi Lampung, BPS Provinsi Lampung	- Integrasi kegiatan ke dalam RPJMD & Renstra
		- Data spasial dan statistik sebagai dasar intervensi (BPS)
		- Edukasi kebencanaan dan pengurangan risiko di kawasan rawan
Akademisi	ITERA, Ir. Anshori Djausal	- Penelitian dan pemetaan kawasan kumuh berbasis bukti
		- Model partisipatif (KKN SDGs, desain partisipatif)
Komunitas/CSO		- Fasilitator proses pembelajaran antar pemangku kepentingan
	YKWS, YSC, YASI, Sekolah Az-Zahra	- Advokasi isu hak dasar, air bersih, dan lingkungan hidup
		- Pemberdayaan masyarakat dan edukasi lingkungan
		- Inovasi komunitas seperti <i>Pocket Forest</i> dan edukasi dini berbasis aksi
Media	RRI, AJI Bandar Lampung	- Penyebaran informasi, edukasi publik, dan narasi kolektif
		- Pelatihan jurnalis dan penguatan literasi media tentang isu SDGs
		- Menjembatani suara komunitas ke level kebijakan
Swasta	Forum CSR Lampung	- Dukungan sumber daya (dana, jaringan, keahlian teknis)
		- Peluang inisiatif bersama dalam revitalisasi lingkungan
		- Penguatan aspek keberlanjutan dalam program CSR

Sumber: Penulis (2025)

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan kota dan komunitas berkelanjutan sangat bergantung pada komunikasi strategis dan proses advokasi yang dilakukan secara sistematis dan partisipatif. Pendekatan kemitraan multipihak (MSP) berbasis pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, media, dan sektor swasta dapat memberikan kerangka kolaborasi yang inklusif dan efektif. Audiensi dengan berbagai aktor menunjukkan bahwa terdapat antusiasme dan potensi sinergi yang kuat jika dikonsolidasikan melalui wadah kolaboratif yang jelas. Komunikasi yang empatik, penguatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan data, serta pembelajaran bersama menjadi elemen penting dalam mendorong transformasi pembangunan kawasan kumuh. Advokasi berperan penting dalam mendorong komitmen para pemangku kepentingan melalui penyampaian informasi, penguatan kesadaran, serta fasilitasi dialog lintas sektor. Advokasi bukan hanya instrumen pendukung, melainkan strategi utama dalam menegosiasikan kepentingan, membangun komitmen kelembagaan, dan mewujudkan tata kelola pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan inklusif. Dalam konteks SDGs 11 di Provinsi Lampung, sinergi ini menjadi krusial untuk mempercepat capaian indikator kota layak huni, aman, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini telah mengidentifikasi pemetaan peran multipihak di Provinsi Lampung dalam konteks SDGs 11 untuk mencapai kota dan pemukiman yang berkelanjutan, terdapat keterbatasan dalam ini yaitu Penelitian difokuskan pada Provinsi Lampung, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki keterbatasan dalam generalisasi ke provinsi atau daerah lain dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Studi selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian di beberapa Provinsi lain di luar Provinsi Lampung untuk menguji transferabilitas model kolaborasi dan strategi komunikasi.

ACKNOWLEDGEMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada *Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit* (GIZ) GmbH atas dukungan pendanaan melalui SDGs SSTC Phase II yang diimplementasikan di Provinsi Lampung dalam KEM11LAU Project. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak dari unsur pentahelix atas bantuan teknis dan dukungan selama proses penelitian dan audiensi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). *Infografik* [Infografik]. <https://lampung.bps.go.id/id/infographic>
- [2] Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024a). *Persentase rumah tangga yang tinggal di hunian kumuh menurut kabupaten/kota* [Tabel statistik]. <https://lampung.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODcxIzI=/persentase-rumah-tangga-yang-tinggal-di-hunian-kumuh-menurut-kabupaten-kota.html>
- [3] Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2024b). *Provinsi Lampung dalam angka 2024*. Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

- [4] Beisheim, M., & Simon, N. (2016). *Multi-stakeholder partnerships for implementing the 2030 Agenda: Improving accountability and transparency*. Analytical paper for the 2016 ECOSOC Partnership Forum.
- [5] Bulmer, E., & Yáñez-Araque, B. (2023). Tackling climate change through multi-stakeholder partnerships: Promoting SDG 17 to combat climate change. *Energies*, 16(9), 3777.
- [6] Databoks. (2025). *Proyeksi jumlah penduduk di 38 provinsi Indonesia tahun 2025*. Diakses pada 20 Mei 2025. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/67d2b3ed8f4b2/proyeksi-jumlah-penduduk-di-38-provinsi-indonesia-tahun-2025>
- [7] Dinas PKPCK Provinsi Lampung. (2023). *Laporan kinerja penanganan kawasan kumuh 2020–2023*. PKPCK.
- [8] Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- [9] Jansen, L. J., & Kalas, P. P. (2020). Improving governance of tenure in policy and practice: A conceptual basis to analyze multi-stakeholder partnerships for multi-stakeholder transformative governance illustrated with an example from South Africa. *Sustainability*, 12(23), 9901.
- [10] Kelvin, K., Widianingsih, I., & Buchari, R. (2025). Kolaborasi model Penta Helix dalam mewujudkan Smart Village Pondok Ranji. *J-3P*, 7(2), 1–5. <https://ejournal.ipdn.ac.id/JPDPP/article/view/2587>
- [11] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2021). *Data dan informasi kawasan kumuh*. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- [12] Kriyantono, R. (2010). *Teknik praktis riset komunikasi*. Kencana Prenada Media Group.
- [13] Kuenkel, P. (2016). *The art of leading collectively: Co-creating a sustainable, socially just future*. Chelsea Green Publishing.
- [14] Kuenkel, P., Kuhn, E., Stucker, D., & Williamson, D. F. (2021). *Leading transformative change collectively: A practitioner guide to realizing the SDGs*. Taylor & Francis.
- [15] Kuenkel, P., & Waddell, S. (2019). *Stewarding sustainability transformations: An emerging theory and practice of SDG implementation*. Springer International Publishing.
- [16] Maltais, A., Weitz, N., & Persson, Å. (2018). *SDG 17: Partnerships for the goals. A review of research needs*. Technical annex to the Formas report *Forskning för Agenda 2030*.
- [17] Pradhipta, R. A., & Nofiyanti, F. (2021). Penta helix strategy in rural tourism (case study of Tugu Utara Bogor). In *E3S Web of Conferences* (Vol. 232, Article 04010). EDP Sciences.

- [18] Pratana, R. A. (2023). *Optimalisasi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung* (Disertasi Doktor, IPDN).
- [19] Putri, C. M. (2021). *Implementasi program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dalam mengatasi permukiman kumuh di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung* (Disertasi Doktor, IPDN Jatinangor).
- [20] Stibbe, D., & Prescott, D. (2020). *The SDG partnership guidebook: A practical guide to building high impact multi-stakeholder partnerships for the Sustainable Development Goals*. The Partnering Initiative & UNDESA.
- [21] Tamin, O. Z. (1997). *Perencanaan, pemodelan dan rekayasa transportasi* (1st ed.). Penerbit ITB.